

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Constanzo, Mark, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- H.M.A. Kuffai, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang, 2004.
- Kaligis, O.C., *Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya*, OC Kaligis & Associates, Jakarta, 2004.
- Makarao, M. Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator ke Positive Legislator*, Konstitusi Press, Semarang, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Plito, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2007.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Nasution, Adnan Buyung, *Praperadilan vs Hakim Komisaris, Komisi Hukum Nasional*, Jakarta, edisi April, 2002.
- Nugroho, Hibnu, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Wajah Baru Praperadilan Indonesia*, Disampaikan pada acara In House Training, di Kejaksaan Negeri Cilacap, Selasa, 25 Agustus 2015 dengan tema “Kajian Normatif Permasalahan Praperadilan”, Hlm.3.
- O.S. Hiairej, Eddy, *Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Pangaribuan, Luhut M, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Djambatan, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- R.Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung, cv.mandar maju, 2001.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012.

Sasangka, Hari, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, cv.mandar maju, Bandung, 2007.

Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Buku Ajar, 2010.

Wisnubroto, Aloysius dan G. Widiaratna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Kepel Press, 2013.

## **2. Jurnal**

Abdul Latif, *Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil*, Jurnal Konstitusi 4.

Ahmad Ardy Effendy, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Tersangka Sebagai Objek dalam Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmiah, 2015.

Ely Kusumastuti, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, Jurnal Yuridika, Vol.33., No.1, Januari, 2018.

Fachrul Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, 2016.

Irfan Islami Rambe, *Upaya Hukum Terhadap Praperadilan*, Jurnal Pionir, Vol.2., No.3, Juli-Desember.

Mahfud MD, *Rambu Pembatasan dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 16., No. 4, 16 Oktober 2009, Yogyakarta, 2009.

Maesa Planginten, *"Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia"*, *Lex Crimen*, Vol.2, No.6.

Nur Ayu Pratiwi, *Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due Process*, Vol.5., No.3, Desember, 2017.

Nur Hidayat, *"Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya"*, Jurnal Yustisia, Vol.10, No.1, Nopember 2010.

Prima Harly Angkow, *Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP*, Jurnal *Lex et Societas*, Vol.1., No.13, Juli, 2013.

Puteri Hikmawati, *Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Kajian, Vol.18., No.1, Maret, 2013.

Rahmad Riyan Coerudin, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta, *Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol.5, Nomor.2, Tahun 2016.

Roberto Leiwakabessy, *Prospek Adanya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Ilmiah, 2014.

Selfianus Laritmas, *Implikasi Hukum Terhadap di Kabulkannya Permohonan Praperadilan Budi Gunawan*, Jurnal UNIERA, Vol.4.

Suriansyah, *Beberapa Masalah Terhadap Eksistensi Praperadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat*, Jurnal Socioscientia, Vol.3., No.2, Juni 2011.

### **3. Sumber Undang-Undang**

Indonesia, Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara 1970 Nomor 74 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara 1981 Nomor 76).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).

\_\_\_\_\_, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Perluasan Objek Praperadilan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

\_\_\_\_\_, Putusan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 Tentang Putusan Praperadilan tidak dapat Banding serta Menetapkan Seseorang Lagi Menjadi Tersangka Lewat Sprindik Baru.